



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 9711-9722

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Dampak Kebijakan Geopolitik & Geostrategis China Di Asia Pasifik Terhadap Indonesia

D R Isnaini<sup>1✉</sup>, A G Sunny<sup>2</sup>, Mulyadi<sup>3</sup>

The State Intelligence College, Sentul, 16810

Email: [dhiaur.ri27@gmail.com](mailto:dhiaur.ri27@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis khususnya di Kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia-Pasifik merupakan kawasan strategis yang mempertemukan negara-negara super power (Amerika Serikat, China, Rusia, dan Jepang). Hal ini memberikan dampak negative maupun positif bagi perkembangan lingkungan strategis Indonesia, terutama jika berkaitan dengan kebijakan geopolitik dan geostrategis negara-negara superpower, khususnya China. Untuk menganalisis dampak tersebut, dalam riset ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil riset menunjukkan bahwa kebijakan geopolitik dan geostrategis China memberikan dampak negatif dan positif di Indonesia, tetapi yang perlu di waspadai adalah dampak negatifnya karena berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas nasional Indonesia.

Kata Kunci : *Debit banjir, angkutan sedimen, agradasi, degradasi*

### Abstract

Indonesia has a strategic geographical position, especially in the Asia Pacific Region. The Asia-Pacific region is a strategic area that brings together super power countries (United States, China, Russia and Japan). This has had both negative and positive impacts on the development of Indonesia's strategic environment, especially when it relates to the geopolitical and geostrategic policies of superpower countries, especially China. To analyze this impact, this research used a qualitative descriptive approach. The research results show that China's geopolitical and geostrategic policies have had both negative and positive impacts on Indonesia, but what needs to be watched out for is the negative impact because it has the potential to be a threat to Indonesia's national stability

Keyword: *Keywords contain basic ideas or concepts that represent the field under study; The number of keywords is between 3-5 Phrases and are sorted alphabetically*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang secara geografis sangat strategis khususnya dalam jalur perdagangan laut, yakni diantara Benua Asia dan Benua Australia serta terletak ditengah samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Posisi inilah yang memberikan keuntungan Indonesia dalam Perdagangan internasional. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa yang menjadikan tanah di Indonesia sangat subur untuk bercocok tanam. Selain itu Indonesia juga memiliki tambang mineral yang potensial 10 s.d 50 tahun kedepan, dengan kualitas mineral terbaik berada di wilayah Indonesia Timur (Papua). Beberapa faktor tersebut yang membuat negara Adi Kuasa berebut untuk melakukan Kerjasama Bilateral dengan Indonesia, dua negara adi Kuasa tersebut adalah China dan Rusia. Banyaknya kejadian dan permasalahan global yang terjadi di tahun 2020 sampai saat ini berdampak pada dunia internasional sehingga membuat percepatan maupun perlambatan dibeberapa bidang secara dinamis, beberapa permasalahan tersebut antara lain krisis finansial global dampak dari Pandemi Covid-19, konflik senjata antara Palestina-Israel, Bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh ulah manusia, hingga adanya isu persaingan perdagangan yang melibatkan jalur sutra China yang melintang melalui selat malaka. Permasalahan tersebut tidak menutup kemungkinan berdampak secara global dan sering memunculkan situasi krisis kemanusiaan dalam skala regional. Tiap kepala negara dan elite global harus cepat bertindak dan mengambil keputusan secara tepat agar terhindar dari permasalahan global terutama dampak Pandemi Covid-19. Pengambilan keputusan Pimpinan Negara menjadi point penting untuk menghindari hegemoni Amerika Serikat yang mendominasi. Saat ini Dunia secara perlahan meninggalkan konstelasi Global yang bipolar maupun unipolar. Secara perlahan Negara-negara berkembang berusaha menyejajarkan kekuatan dan mencari legitimasi kekuatan, sehingga berefek merubah tatanan system internasional menjadi multipolar.<sup>3</sup>

Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis memberikan implikasi positif maupun negative pada bangsa Indonesia. Negara di Dunia dituntut untuk saling bekerjasama, namun disisi lain persaingan antar negara dalam melindungi kepentingan nasional juga semakin meningkat Interdependensi antar Negara semakin menguat, ego sektoral dan premodialisme suatu suku bangsa mulai luntur dengan pengaruh akulturasi budaya baru sehingga menyebabkan hilangnya kekhasan suatu bangsa. Selain itu implikasi negative nyata yang timbul dari dinamika tersebut adalah adanya potensi ancaman yang timbul dan berdampak jelas pada stabilitas nasional.

Sementara itu, Kawasan Asia-Pasifik merupakan kawasan strategis yang mempertemukan negara-negara superpower (Amerika Serikat, China, Rusia, dan Jepang)

yang juga memiliki perkembangan pesat, bisa dilihat begitu banyak organisasi-organisasi dan kerja sama (bilateral ataupun multilateral) seperti Association South East Asian Nations (ASEAN), Asean Regional Forum (ARF), Pacific Basic Economic Council, Asean Vision Group, Asean Senior Official Meeting (SMO), East Asian Summit, Shanghai Cooperation Organization (SCO), Asia Pacific Economic Cooperation, Council on Security Cooperation in the Asia Pacific, East Asia Latin America Cooperation serta Northeast Asia Security Cooperation Dialogue (Sambaugh 2003; Acharya 2014). Amerika sudah mulai membidik Kawasan Asia-Pasifik sejak era Presiden Barrack Obama dengan memfokuskan kekuatan politik, militer dan ekonominya. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan kekuatan di wilayah Asia dan memanfaatkan potensi yang ada. Karena Amerika tahu bahwa China merupakan 5 ancaman terbesar dalam persaingan Perdagangan Internasional. Pengaruh China dapat dilihat di Kawasan Asia-Pasifik dengan membaiknya sektor perekonomian dan infrastruktur beberapa negara di kawasan tersebut, hal ini karena campur tangan China dalam mengalokasikan anggarannya, Bank Dunia memperkirakan sekitar US\$500 miliar devisa China diinvestasikan (Piutang) dalam proyek jalur sutra hingga 2019 lalu, yang tersebar di 50 negara berkembang.

Indonesia sendiri, sebagai negara yang berkedudukan sebagai negara maritim paling strategis di Kawasan Asia-pasifik sedang menghadapi resiko yang problematis. Kekhawatiran Indonesia adalah wajar mengingat bahwa negara anggota ASEAN ini berada di zona konsentris persaingan geopolitik AUKUS dan China. Pada sisi lainnya, Indonesia juga dihadapkan pada kalkulasi untuk memelihara hubungan diplomatik secara bilateral yang telah terjalin dengan Australia, Inggris, Amerika Serikat, dan China serta berupaya mempertahankan upaya non-proliferasi nuklir di kawasan (Priyandita dan Herscovitch 2021). Namun, sejauh ini, sikap Indonesia cenderung berada di 'dua kaki' dan berusaha untuk mempertahankan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini diterapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji dampak kebijakan geopolitik dan geostrategis China di Asia Pasifik terhadap Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah untuk menggali data lebih dalam mengenai fenomena yang ada. Adapun desain metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek-objek sesuai dengan kenyataan digunakan untuk menyajikan data secara deskriptif. Sumber data menggunakan artikel dalam jurnal maupun buku yang sudah diterbitkan untuk melakukan analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

eopolitik dan Geostrategis China di Kawasan Asia Pasifik

China merupakan salah satu negara besar di kawasan Asia Pasifik yang mengalami perkembangan cukup besar sehingga mampu menciptakan persaingan global di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 2014, China menduduki status ekonomi negara dengan nilai GDP tertinggi di dunia, pada posisi kedua setelah AS, dengan volume GDP sebesar hampir 17 triliun dolar AS.<sup>33</sup> China menunjukkan kekuatan ekonominya di kancah internasional melalui aktivitas ekspor dan impor yang seimbang dimana total volume perdagangan yang diperoleh sekitar 260 juta dolar AS di tahun 2013. China juga merupakan negara tertinggi penghasil gandum, batu bara, besi, baja, dan semen. Dominasi China dalam aspek ekonomi di kawasan dapat menjadi sebuah ancaman bagi negara-negara sekitar. ASEAN mengungkapkan bahwa China mampu bergerak dalam hal investasi asing dengan perolehan 50-70 persen FDI (Foreign Direct Investment) di Asia. Selain itu, ASEAN juga harus menghadapi kemampuan China sebagai produsen dengan berbiaya rendah terkemuka di dunia, tidak hanya dari segi tenaga kerja yang intensif untuk barang-barang tekstil, tapi juga berupa teknologi informasi, perangkat keras, dan elektronik.

Pada perkembangannya, China mampu menciptakan sebuah Bank yang beroperasi di kawasan Asia Pasifik, yaitu disebut dengan AIIB (Asia Infrastructure Investment Bank). Bank ini memiliki tujuan untuk mendukung konektivitas, integritas, dan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan serta meningkatkan daya saing negara-negara di Asia. Adapun tujuan lainnya adalah seperti untuk memenuhi kesenjangan dalam pembiayaan infrastruktur apabila bank multilateral lainnya tidak mampu memenuhi hal tersebut. Selain itu, kerangka kerjasama ekonomi juga menjadi perhatian negara China agar mampu menjalin interaksi dengan baik terkait kepentingan ekonomi yang ingin diperoleh di kawasan Asia Pasifik. China telah tergabung dalam kerjasama ekonomi dengan organisasi regional ASEAN melalui kerjasama ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Dalam ACFTA ada terdapat sebuah peraturan kerjasama ekonomi yang dirancang untuk mempercepat implementasi ACFTA dengan pengurangan pajak untuk beberapa produk, khususnya pada produk pertanian, ternak, daging, ikan, produk susu, tanaman hidup, sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan, untuk negara-negara ASEAN memperoleh akses yang lebih cepat terhadap pasar China sebelum perjanjian tersebut terbentuk.

China juga tidak hanya terlibat dalam kerjasama dengan ASEAN, namun China telah terlibat dalam sebuah kerjasama perdagangan multilateral di wilayah Asia. Kerjasama tersebut disebut dengan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang terdiri dari 10 negara ASEAN, Australia, Selandia Baru, India, China, Jepang, dan Korea Selatan. Hal

ini sangat baik untuk kepentingan China karena kemampuan China yang dapat menawarkan akses pasar yang lebih luas ke berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama ini juga termasuk strategi yang tepat untuk mengintegrasikan aktivitas ekonomi Asia Pasifik serta sebagai bentuk penyeimbang kekuatan ekonomi AS melalui TPP nya di kawasan Asia Pasifik. Dalam kerjasama multilateral, China juga ikut bergabung dalam ASEAN Regional Forum (ARF) yang telah berdiri sejak tahun 1994. ARF bertujuan untuk membangun dialog bersama yang efektif terkait isu-isu politik dan keamanan kawasan Asia Pasifik. Adapun pembentukan ARF pada dasarnya merupakan sebuah langkah ASEAN dalam menghadapi kekuatan di luar kawasan, seperti Jepang, India, dan tentunya China di Asia Pasifik. Namun, China tetap menetapkan kebijakannya untuk bergabung dalam forum regional tersebut untuk mencegah konflik antar sub kawasan yang mampu membahayakan kedaulatan China serta untuk mencegah adanya persepsi bahwa China adalah ancaman bagi mereka di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, China juga menerima norma-norma penyelesaian konflik yang damai dan non-proliferasi nuklir yang terangkum dalam keikutsertaan China dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC).

Kekuatan ekonomi China yang semakin meningkat juga diikuti oleh perkembangan militer China di kawasan Asia Pasifik. Perolehan jumlah GDP yang besar memberikan China peluang besar untuk meningkatkan kekuatan militernya di kawasan. China telah memaparkan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan militer mengalami kenaikan hingga mencapai 670,27 milyar yuan pada tahun 2012. Hal ini berarti bahwa anggaran tersebut mengalami peningkatan sebesar 11,2 persen atau 67 juta milyar yuan dari anggaran tahun sebelumnya. China terus berupaya dalam modernisasi seluruh perangkat pertahanan dalam segi kapabilitas militer yang terdiri dari armada angkatan laut, pesawat tempur, kapal selam, rudal, dan kemampuan radar. Terlebih lagi peningkatan kapabilitas pertahanan dipenuhi untuk mempersiapkan dalam menghadapi perselisihan antar negara kawasan Asia Pasifik di Laut China Selatan. China merupakan negara dengan jumlah kapal terbesar di Asia, yang telah dipersiapkan oleh PLAN (People's Liberation Army Navy) sebanyak lebih dari 300 kapal permukaan, kapal selam, kapal amfibi, dan kapal patroli.

China juga menunjukkan kekuatan militernya dengan percobaan uji terbang rudal baru yang dikenal dengan nama Dong Ning-3. Hal ini diyakini Pentagon sebagai upaya China untuk mengahapi satelit AS di luar angkasa dengan tujuan untuk membatasi kekuatan militer AS ataupun intelijen dan pasukan navigasi.<sup>50</sup> Dinamika politik dalam kawasan ini semakin kompleks dengan munculnya China sebagai negara besar yang mengalami peningkatan cukup pesat terutama dalam urusan ekonomi dan militer. Dalam kasus sengketa Laut China Selatan, pola tindakan China terlihat sangat agresif demi pemenuhan

kepentingan nasional nya. Klaim China atas wilayah ini dengan menggunakan "nine-dash line" yang dinilai oleh AS masih belum akurat titik koordinat serta legalitas gambaran klaim tersebut. Terlebih lagi penetapan klaim China ini hampir mencakup seluruh area di sekitar Laut China Selatan sehingga menuai reaksi dari beberapa negara yang ikut terlibat dalam kasus sengketa wilayah ini, yakni seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan. Selanjutnya, China berupaya melakukan peningkatan dalam reklamasi tanah dan pembangunan infrastruktur di pos penting Laut China Selatan, seperti di Pulau Spratly. Pos penting ini nantinya akan dilengkapi dengan pelabuhan, komunikasi dan sistem pengawasan, fasilitas logistik, serta lapangan udara.

Laut China selatan sangat berperan penting terhadap geopolitik di Asia-Pasifik. Selain berbatasan dengan beberapa negara termasuk negara-negara ASEAN dan Indonesia, Laut China Selatan selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak dan juga cadangan gas yang melimpah. Melihat posisi nya yang strategis sebagai jalur perdagangan dan juga memiliki nilai kekayaan alam serta potensi ekonomi disana, hal ini menjadi faktor pemicu sengketa maritim dan teritorial antar negara-negara di Kawasan tersebut, bahkan menjadi ketegangan antara China dan Amerika. Angkatan laut Amerika mengiriskan kapal-kapal induk patrol ke perairan Laut China Selatan, hal ini menjadi provokasi Amerika terhadap china, sementara Amerika dan china sudah terlibat perang dagang dan juga konflik permasalahan Covid 19. Kompleksitas permasalahan yang terus berkembang menyesuaikan dinamika hubungan internasional Negara-negara adi Kuasa ini lah yang berdampak ancaman strategis pada Indonesia khususnya dalam perspektif Geopolitik dan Geostrategis. Meningkatnya kemungkinan persaingan antar negara besar hal ini tentu menjadi tantangan bagi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia yaitu bagaimana mencegah sengketa wilayah maritim ini menjadi sumber instabilitas regional. Terlebih lagi China mempunyai pengaruh besar di ASEAN, terutama semenjak dibangunnya jalur sutra baru atau proyek BRI (Belt and Road Initiative) China membangun berbagai fasilitas infrastruktur guna mengamankan jalur perdagangan Internasionalnya termasuk di Indonesia, sementara itu Indonesia juga terlibat persetujuan dengan China terkait dengan perairan di Kepulauan Natuna, yaitu klaim sepihak China bahwa daerah perairan Natuna di Laut China Selatan merupakan wilayah penangkapan ikan laut tradisional China. Hal ini akan mempengaruhi kebijakan pertahanan Indonesia mengingat pengaruh besar China di ASEAN

Hubungan bilateral Indonesia-China telah berlangsung sejak 1940-an sampai dengan saat ini, meskipun pada tahun 1965 s.d 1987 hubungan diplomatik kedua negara tersebut sempat dibekukan era Pemerintahan Soeharto karena adanya partai terlarang di Indonesia yang berasal dari China dengan membawa paham Komunis yang membawa dampak buruk,

perselisihan SARA, serta perlakuan Keji terhadap Petinggi Negara . Rezim Soeharto memberlakukan larangan berhubungan apapun dengan China melalui Departemen Luar Negeri-nya, serta memberlakukan hukuman pemecatan bagi pegawai diplomat yang melanggar. Hal ini berbanding terbalik dalam kurun 15 Tahun terakhir, khususnya jangka waktu 5 tahun era Pemerintahan Joko Widodo, saat ini hubungan bilateral Indonesia-China menjadi sangat komprehensif dan strategis. Baik dalam Kerjasama Bilateral, Regional-ASEAN, Plurilateral-G20 (Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors) dan Multilateral-PBB. Meskipun demikian kedekatan ini memiliki efek like and dislike dari negara Maju di dunia, khususnya Negara Barat yang sebelumnya menjadi ujung tombak Kerjasama bidang ekonomi, pertahanan-keamanan, dan politik luar negeri.

Kebijakan dan Langkah berani yang diambil era Pemerintahan Joko Widodo dalam mengembangkan Kerjasama dengan Negara luar antara lain penetapan Perpres 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa yang diberlakukan untuk 169 Negara. Dalam konsiderans Peraturan Presiden tersebut dapat dilihat bahwa terdapat dua pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Presiden terkait Bebas Visa, antara lain :

a. Untuk meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara lain, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat;

b. Untuk memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu untuk menyesuaikan jumlah negara dari 75 menjadi 169 Negara., pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan (Putri & Ma'arif, 2019) (Zhang, 2018) (Fuaddah, 2021) (Prabaningtyas & Prabandari, 2020) (Djalal, 2020) (Erdian, 2018) (R, 2015) dari kewajiban memiliki visa kunjungan.

Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan bebas visa kunjungan ini menimbulkan dan berpotensi menjadi sumber permasalahan karena banyaknya bandara di Indonesia yang berstatus Pintu masuk International sehingga menyulitkan dalam pengawasan mobilitas WNA, ditambah Mayoritas system penerbangan melayani Direct Fligth dari China ke Indonesia dengan paket wisata yang sangat murah (Subdsidi pengusaha China di daerah tujuan dan program pemerintah Indonesia-China) meskipun system pencatatan di Imirasi sudah bisa dilukan secara terkoneksi-online untuk mempermudah pengecekan petugas imigrasi, permasalahan lain yang mungkin timbul adalah berkurangnya penerimaan negara (Visa Tax, pedagang pribumi-nusantara tidak mendapat efek significant karena paket wisata

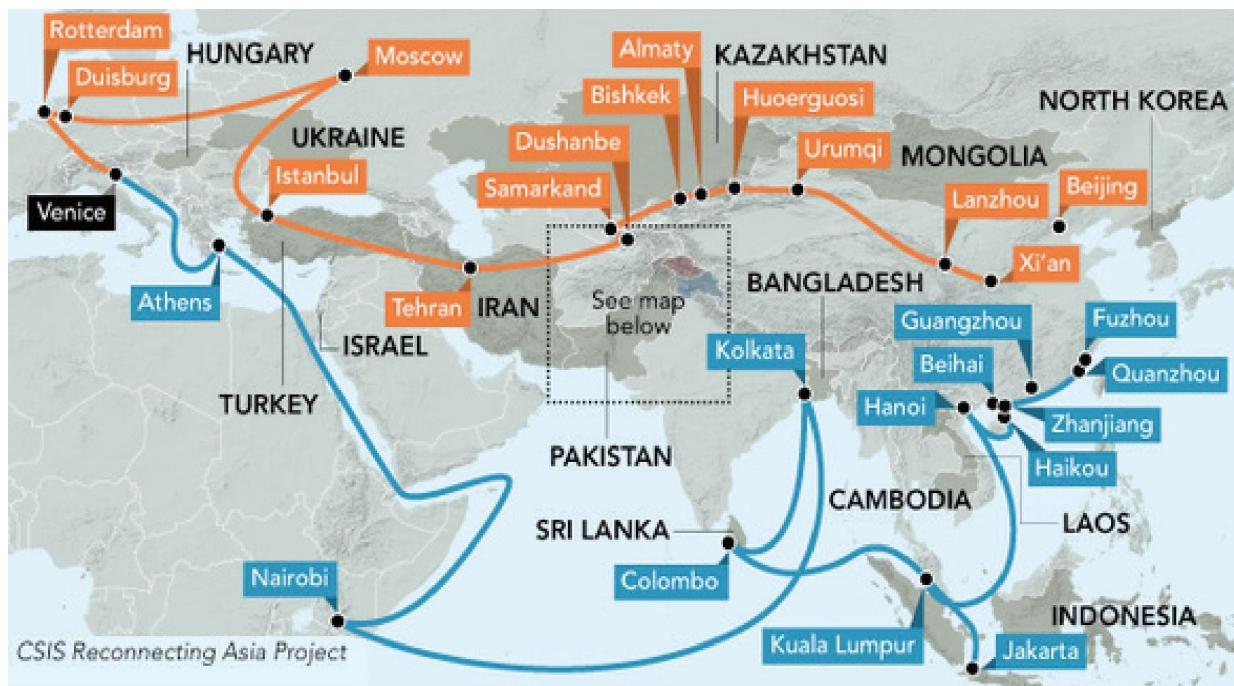
yang ada memanfaatkan pengusaha China didaerah wisata/Subsidi silang dan pembayaran yang digunakan berupat e-payment aplikasi China sehingga tidak ada perputaran uang yang real), potensi ancaman keamanan dalam negeri, ketertiban, hingga persoalan tenaga kerja.

Selain itu adanya bebas visa juga menimbulkan beberapa pelanggaran yang dilakukan WNA antara lain Cyber Crime, penyalahgunaan perizinan, ancaman terorisme, penyelundupan narkoba, Human Trafficking, penyalahgunaan masa aktif visa kunjungan Wisata (30 Hari-4 kali perpanjangan) yang dimanfaatkan untuk bekerja di Negara tujuan dan Infiltrasi Agen Negara Lain untuk melaksanakan operasi Intelijen. Asas manfaat dan asas resiprokal pada selective policy juga masih perlu dievaluasi. Terkait dengan asas manfaat, kasus yang sempat menyita perhatian publik adalah kasus pengeboran oleh 5 (lima) warga negara China (Identitas Tentara) di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, hal ini merupakan tamparan keras bagi Pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi bahwa masih lemahnya kemampuan personel, Sistem pendataan maupun peralatan pendukung dalam pengawasan Orang Asing dan perlengkapan/peralatan pendukung dalam melakukan monitoring dan tracking. Alih-alih memberikan manfaat, 5 warga negara China itu malah melakukan kegiatan ilegal, perkembangan terakhir 5 orang warga negara China tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.

Permasalahan asas Resiprokal adalah tidak semua negara yang berada didaftar 169 Negara bebas Visa kunjungan di Indonesia juga memberikan kebijakan bebas Visa bagi Warga Negara Indonesia yang berkunjung. Selain itu 169 Negara yang diberikan bebas Visa oleh pemerintah Indonesia berdasarkan hasil pendataan yang ada, Sebagian besar negara tersebut Warganya bukan merupakan wisatawan yang sering melakukan perjalanan dengan destinasi wisata di Indonesia. Hal ini sangat perlu menjadi atensi khusus pemerintah agar mengeliminir kemungkinan timbulnya ancaman Intelijen asing. Di sisi lain, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis global yang menuntut negara-negara di dunia untuk saling bekerja sama, Indonesia mulai melangkah dengan menjalin hubungan Kerjasama dengan negara-negara maju dalam hal ekonomi, politik maupun pariwisata. salah satunya adalah China. Namun, semakin lama Indonesia semakin bergantung kepada China mengingat naiknya hutang Indonesia ke China secara signifikan serta mulainya penggunaan mata uang yuan dalam transaksi luar negeri. Hal ini tentu saja akan dapat membawa dampak ekonomi dan politik yang negative pada Indonesia.

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan China semakin kuat dilihat beberapa tahun belakangan ini dari banyaknya Investor dari China dan juga gencarnya pendanaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang digalakkan oleh China di Indonesia dalam program

BRI (Belt and Road Intiatives) seperti pada gambar berikut.



**Gambar 1. Peta Belt Road Initiative (BRI)**  
Sumber: CSIS Reconnecting Asia Project

Beberapa proyek BRI di Indonesia antara lain adalah Kereta Cepat Indonesia China, KRL, PLTA di Medan, pembangunan Industrial park, jalan tol, dan proyek lain. Sayangnya, tenaga-tenaga kerja Asing dari China pun banyak yang masuk ke Indonesia semenjak hubungan bilateral antara Indonesia dan China semakin kuat di jaman presiden Joko Widodo hal ini dikhawatirkan akan menjadi rawan konflik dengan pekerja lokal. Untuk proyekproyek BRI (Belt and Road Intiatives) Indonesia disamping harus memperkerjakan tenaga asing dari china, Indonesia juga harus memesan bahan baku 70% dari China, tentu saja hal tersebut semakin memudahkan China untuk perluasan perusahaan dan mendapatkan akses pasar. Alih-alih dapat mengembangkan perekonomian, Indonesia justru memberatkan para pelaku industry lokal dan lapangan pekerjaan yang diharapkan masyarakat juga tidak tersedia. Hal tersebut membuat Indonesia juga tak sepenuhnya mendapat Transfer Technology dan juga Transfer Knowledge dari China. Untuk itu, sangat penting bagi Indonesia untuk segera mengambil langkah strategis dalam menjalin hubungan Kerjasama dengan China. Hubungan Kerjasama China dan Indonesia dalam hal Infrastruktur tidak semata – mata karena tujuan Politik, Langkah ini di ambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan program pemerataan pembangunan di Indonesia. Namun yang kita ketahui Indonesia tidak mempunyai cukup modal untuk melaksanakan kegiatan

pemerataan pembangunan secara cepat di wilayah. Tentu saja hal ini sangat mendorong pemerintah Indonesia tertarik untuk bekerjasama dalam hal pengembangan infrastruktur dengan China sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami Urgensi Pembangunan demi memajukan perekonomian. Namun, melihat contoh-contoh Kerjasama China dengan negara-negara lain, Indonesia harus segera mempertimbangkan Kembali apakah kerjasama Infrastruktur dengan China benar-benar mendapatkan implikasi yang positif atau malah sebaliknya.

Hal yang sudah terlihat jelas adalah melemahnya perlawanan tegas ke China karena Indonesia sudah sangat bergantung terhadap China sehingga Indonesia merasa sungkan untuk bertindak tegas terhadap China yang semakin agresif di laut China Selatan dengan masuknya kapal-kapal penangkap ikan illegal dari laut China Selatan ke Indonesia. Semakin gencarnya isu melemahnya sikap Indonesia terhadap China, muncul lah sentimental rakyat Indonesia terhadap China yang sering kita dengar dengan AntiChina mengingat sejarah Indonesia dengan China pada masa lalu. Hal ini memberikan kesempatan untuk melakukan tekanan – tekanan politik terhadap pemerintah Indonesia dengan mengandalkan isu yang tersebar luas bahwa pemerintah Indonesia Pro China bahkan disebut sebut pemerintah ingin mengganti ideologi Negara Indonesia. Hal ini sangat mengganggu stabilitas keamanan di Indonesia melihat sikap rakyat Indonesia yang mulai krisis kepercayaan terhadap pemerintahan di Indonesia.

## SIMPULAN

Kawasan Asia-Pasifik merupakan kawasan strategis yang mempertemukan negara-negara super power (Amerika Serikat, China, Rusia, dan Jepang). Indonesia sendiri, sebagai negara yang berkedudukan sebagai negara maritim paling strategis di Kawasan Asia-pasifik menghadapi resiko yang problematis. Kompleksitas permasalahan yang terus berkembang menyesuaikan dinamika hubungan internasional Negara-negara super power ini lah yang berdampak ancaman strategis pada Indonesia khususnya dalam perspektif Geopolitik dan Geostrategis. Kebijakan geopolitik dan geostrategis China di Asia Pasifik di antaranya dibangunnya jalur sutra baru atau proyek BRI (Belt and Road Initiative) dengan berbagai fasilitas infrastruktur guna mengamankan jalur perdagangan Internasionalnya termasuk di Indonesia, sementara itu Indonesia juga terlibat persetujuan dengan China terkait dengan perairan di Kepulauan Natuna, yaitu klaim sepihak China bahwa daerah perairan Natuna di Laut China Selatan merupakan wilayah penangkapan ikan laut tradisional China. Hal ini tentu berdampak pada kebijakan pertahanan Indonesia mengingat pengaruh besar China di ASEAN. Selain itu, semakin lama Indonesia semakin bergantung kepada China mengingat

naiknya hutang Indonesia ke China secara signifikan serta mulainya penggunaan mata uang yuan dalam transaksi luar negeri. Hal ini tentu saja akan dapat membawa dampak ekonomi dan politik yang negative pada Indonesia. Adanya sentiment AntiChina juga memberikan kesempatan untuk melakukan tekanan – tekanan politik terhadap pemerintah Indonesia dengan mengandalkan isu yang tersebar luas bahwa pemerintah Indonesia Pro China bahkan disebut-sebut pemerintah ingin mengganti ideologi Negara Indonesia. Hal ini sangat mengganggu stabilitas keamanan di Indonesia melihat sikap rakyat Indonesia yang mulai krisis kepercayaan terhadap pemerintahan di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Djalal, D. P. (2020, Desember 31). Hubungan Indonesia-China, Pilar Stabilitas Kawasan Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hubungan Indonesia-China, Pilar Stabilitas Kawasan", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/31/16172591/hubungan-indonesia-china-pi>. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/31/16172591/hubungan-indonesia-china-pilar-stabilitas-kawasan?page=all>
- R, U. (2015). Reposisi Intelijen Negara Dalam Badan Intelijen Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.
- Erdian. (2018, Februari 27). Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan dengan Selective Policy Keimigrasian Indonesia. Retrieved from Kanwil Jawa Barat Kemenkumham: <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian>
- Prabaningtyas, R. F., & Prabandari, A. (2020, Desember). A Synergy of Political and Normative Motives In China's Humanitarian Diplomacy During The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Penelitian Politik*, 17, 159-178.
- Zaedun, S. (2012, Juli 11). Teori Universal Geopolitik. Retrieved from Fakultas Hukum Universitas Pattimura: <https://fhukum.unpatti.ac.id/teori-universal-geopolitik/>
- China: growth rate of real gross domestic product (GDP) from 2010 to 2022, diakses di <https://www.statista.com/statistics/263616/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-china>
- Evelyn Goh, Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies, diakses di <https://www.eastwestcenter.org/publications/meeting-china-challenge-ussoutheast-asian-regional-security-strategies>

- Humphrey Wangke, Penguatan Pengaruh Tiongkok Di Kawasan Asia Pasifik Melalui Pembentukan AIB, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 07/I/P3DI/April/2015, hal 5
- Muhammad Azzam Julda, Respon Cina Menghadapi Amerika Serikat Dalam Inisiasi TransPacific Partnership Di Kawasan Asia Pasifik Tahun 2009-2015, diakses di <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/5443>
- Mochtar Kusuma-Atmadja, The Emerging Powers in Asia with Hegemonistic Ambitions, Some Thoughts on ASEAN Security Co-operation, Contemporary Southeast Asia, vol. 12, no. 3 (December 1990) dalam Amitav Acharya, 2003, Constructing a Security Community in Southeast Asia : ASEAN and The Problem of Regional Order, London and New York: Routledge. Hal 168
- Zhang, C. (2018, May 29). The Belt and Road's Impact. Fuaddah, M. N. (2021, Januari 21). Hubungan Israel dan China: Seperti Apa Investasi China yang Maju Pesat di Bawah Kendali Xi Jinping di 'Tanah Yahudi' Itu? Retrieved from Intisari Online: <https://intisari.grid.id/read/032520559/hubungan-israel-dan-china-seperti-apainvestasi-china-yang-maju-pesat-di-bawah-kendali-xi-jinping-di-tanah-yahudiitu?page=all>
- Putri, S. Y., & Ma'arif, D. (2019, September). Kerja Sama Ekonomi-Politik Indonesia dan Cina pada Implementasi Program Belt and Road Initiative. Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 39 | September 2019, 39, 53-66.
- Ainurrohman, D. (2020, November 2). DosenGeografi.com. Retrieved from dosengeografi.com: <https://www.dosenpendidikan.co.id/geopolitik-adalah>